



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH VIII
UPT SMKN 1 BARRU**

Jl. Melati No 57 Barru, Telp. (0427) 21127 Kode Pos 90711

Email : smkn01barru@gmail.com Website : <https://smkn1barru.sch.id>

**KEPUTUSAN KEPALA UPT SMK NEGERI 1 BARRU
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 421.5/075-UPT SMK.1/WILVIII/PSB.3/DISDIK**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK
UPT SMK NEGERI 1 BARRU**

- Menimbang :**
- a. setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun dalam lingkungan sekolah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 54 Undang-undang Perlindungan Anak mengamanahkan agar setiap di dalam dan dilingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain;
 - c. bahwa salah satu indikator Kabupaten/Kota Layak Anak yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah adalah mewujudkan Sekolah Ramah Anak atau sekolah yang aman, bersih, sehat, hijau, inklusif dan nyaman bagi perkembangan fisik, kognisi, dan

psikososial anak termasuk aman yang memerlukan pendidikan layanan khusus;

- d. bahwa Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak telah memuat tentang indikator yang harus dipenuhi oleh Organisasi Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga lainnya yang terkait untuk bersama-sama mewujudkan Sekolah Ramah Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah tentang Tim Pelaksana Pengembangan Sekolah Ramah di Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3786);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Kekerasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Prundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran NeNegara Republik Indonesia Nomor 5410);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak);
15. Instruksi Presiden Nomor 05 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);

20. Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 271);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKHNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DANA ANAK

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengembangan Sekolah Ramah Anak di UPT SMK Negeri 1 Barru, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan;

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Pengembangan Sekolah Ramah Anak sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah : :

1. Melakukan Sosialisasi Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak dengan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Kabupaten/Kota.
2. Mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di satuan pendidikan untuk mengembangkan Sekolah Ramah Anak.
3. Mengintegrasikan kebijakan, program dan kegiatan masing-masing pihak kedalam kegiatan yang sudah ada dilingkungan pendidikan.
4. Mengidentifikasi komponen-komponen penting yang tedapat dalam perencanaan pengembangan Sekolah Ramah Anak untuk disenergikan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) seperti

Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pangan Jajanan Anak sekolah, Sekolah Adiwiyata, Sekolah Inklusi, Sekolah Aman Bencana, Sekolah Hebat, Kantin Kejujuran, Bebas Napza, Sekolah Berkarakter, Sekolah Bebas Kekerasan, dan lainnya.

5. Melakukan pemantauan sebara berkala terhadap pelaksanaan pengembangan Sekolah Ramah Anak

KETIGA : Tim Pelaksana Pengembangan Sekolah Ramah Anak di UPT SMK negeri 1 Barru dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala UPT SMK Negeri 1 Barru.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang relevan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal: 20 Maret 2023

KEPALA UPT SMKN 1 Barru

Dis. ARIFIN
Nip. 19650415/198903 1 021

TEMBUSAN :

1. Bupati Barru (sebagai laporan)
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barru di Barru
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Parepare
4. Dinas m Setda Kabupaten Barru, di Barru;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT SMKN 1 BARRU
TENTANG : SUSUNAN TIM SUSUNAN TIM PELAKSANA
PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK UPT SMK
NEGERI 1 BARRU

Pembina : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
Ketua Komite SMK Negeri 1 Barru.
Penanggung Jawab : Kepala UPT SMK Negeri 1 Barru.
Ketua Pelaksana : Mustanan, S.Pd.i.,M.Pd.i

Bidang-Bidang :

Bidang Pengawasan Pelaksanaan Karikulum yang Ramah Anak

Ketua : Drs. Muhammad Kasim, M.Si
Anggota : 1. Mulyadi, S.Pd, Gr
2. Muhammad Rafiq, S.Pd
3. Hj. Syahrianti, S.Pd
4. Dasriani, S.Pd,Gr

Bidang Pengawasan Kesehatan dan Lingkungan

Ketua : Drs. H. Suparmin
Anggota : 1. Marhaeni Rusli, S.Pd
2. Faizal, S.Pd
3. Husain, S.Pd
4. Dra. Hj. Hartati Muhammad

Bidang Koordinasi dan Sosialisasi

Ketua : Herniati Badrun, S.Pd.,M.Pd
Anggota : 1. Darwin, S.Sos
2. Amsar Madeing, S.Kom
3. Lindayani, S.Pd.,Gr
4. Aswar, S.Sos

Tim Monitoring dan Evaluasi

Ketua : Drs. Sultan. M.M
Anggota : 1. Drs. Abd. Kadir S, M.M
2. Dra. Hj. Nasrah
3. Dra. Hj. Rustiah, M.M
4. Rahmani Wijaya, S.Pd

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal : 20 Maret 2023

**KEPALA UPT SMKN 1 Barru**
Drs. ARIFIN
Nip. 19650415 198903 1 021